

## KERJA SAMA INDONESIA – BELANDA DALAM PENANGGULANGAN BANJIR DI JAKARTA MELALUI PROYEK NATIONAL CAPITAL INTEGRATED COASTAL DEVELOPMENT (NCICD)

Citra Ramadhani<sup>1</sup>

**Abstract:** *This thesis aims to identify and describe the forms of Indonesian -Dutch cooperation in flood management in Jakarta through the National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) project. The research method used is qualitative research. The data collection technique is library research and the data analysis technique uses qualitative data analysis (content analysis). The results showed that the form of Indonesian -Dutch cooperation in flood prevention in Jakarta through the NCICD project was that the Dutch and Indonesian governments built the NCICD embankment, formed a special NCICD unit and helped finance the design and development of the National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) Master Plan. The construction of the NCICD was carried out by the Indonesian government through the Ministry of Public Works & Housing by creating a special unit consisting of a combination of the Ministry's internal divisions of Public Works & Housing (Directorate General of Natural Resources, Directorate General of Cipta Karya, BPIW, and Balitbang) consisting of three Project Management Units (PMU) and one PMU Secretariat.*

**Keywords:** *National Capital Integrated Coastal Development, Jakarta, Flood*

### Pendahuluan

Ibukota negara Indonesia, Jakarta menghadapi risiko banjir parah yang mengancam lebih dari 10 juta penduduk. Pada tahun 2007 Jakarta dilanda banjir yang disebabkan oleh curah hujan tinggi yang menyebabkan hilangnya 80 jiwa. Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi menimbulkan tekanan pada lingkungan hidup Jakarta yang semakin lama semakin berat. Perpaduan antara kondisi geografis yang rendah dan dialiri oleh banyak sungai, serta kian rusaknya lingkungan hidup akibat tekanan pertumbuhan penduduk, menyebabkan Jakarta kian lama kian rentan terhadap ancaman bencana banjir.

Banjir di kota Jakarta berkaitan dengan banyak faktor antara lain pembangunan fisik dikawasan tangkapan air di hulu yang kurang tertata baik, urbanisasi yang terus meningkat, perkembangan ekonomi, dan perubahan iklim global. Upaya pencegahan terhadap bencana banjir di Jakarta sangat penting karena Jakarta merupakan ibukota Indonesia yang menjadi representasi Indonesia kepada dunia.

Selama ini untuk pengendalian banjir di Jakarta beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta yaitu memastikan saluran air dan tali – tali air tidak tersumbat sehingga menyebabkan genangan air, melakukan normalisasi sungai yang ada di Jakarta, mengoptimalkan pompa stasioner untuk mengatur debit air sungai dan saluran air. Pada tahun 2020 pemerintah provinsi DKI Jakarta memiliki 421-unit pompa stasioner yang tersebar di 142 lokasi. Pompa-pompa tersebut memiliki kapasitas 0,06 – 6,7 meter kubik per detik.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR, kawasan pesisir Jakarta terus mengalami penurunan permukaan tanah hingga 11-12 cm per tahun, sehingga banjir rob kerap terjadi. Hal ini diperparah dengan terjadinya kenaikan muka laut akibat perubahan iklim yang bila tidak segera ditangani dalam beberapa tahun akan terjadi *back water*, dimana aliran sungai tidak bisa mengalir ke laut.

Untuk itu pemerintah Belanda dan sektor pengelolaan air telah memenuhi permintaan dari pemerintah Indonesia untuk merumuskan rencana peningkatan pertahanan banjir Jakarta. Upaya ini menghasilkan rencana strategis yang dikenal dengan National Capital Integrated Coastal Development program (NCICD)/ Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN) pada tahun 2014. Proyek *National Capital Integrated Coastal Development* (NCICD) adalah implementasi dari proyek Giant Sea Wall yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan, memulihkan dan meningkatkan ketahanan lingkungan ibukota negara Republik Indonesia secara terintegrasi. *Groundbreaking* proyek NCICD dilakukan pada 9 Oktober 2014.

Proyek ini adalah kerja sama antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia dengan Kementerian Infrastruktur dan Lingkungan Belanda. Belanda membantu dalam hal kelembagaan dan finansial dalam proyek NCICD. Penandatanganan *Letter of Intent* NCICD oleh pemerintah Indonesia dan Pemerintah Belanda dilakukan pada September 2015. Penandatanganan *Memorandum of Understanding National Capital Integrated Coastal Development* oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Lingkungan Hidup Indonesia Basuki Hadimuljono dengan Kementerian Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Belanda Melanie Henriette Schultz Van Haegen-Mass Geestaranus dilakukan pada tanggal 2 Agustus 2016.

Tujuan pembuatan proyek NCICD adalah untuk memberi perlindungan jangka panjang untuk Jakarta dari banjir dari sungai dan air laut.

Ada tiga fase dari mega proyek ini yaitu :

Fase A : Fase A difokuskan untuk meningkatkan perlindungan pantai yang ada saat ini. Penguatan dan pengembangan tanggul-tanggul pantai yang sudah ada sepanjang 30 kilometer.

Fase B : Fase B difokuskan pada upaya membangun tanggul laut luar barat dan waduk besar yang diperkirakan akan dibangun dalam kurun waktu 2018 sampai dengan 2020.

Fase C : difokuskan untuk membangun tanggul luar timur yang akan dibangun setelah tahun 2023. Beberapa pengembangan jangka panjang di sisi timur teluk Jakarta dilakukan dengan menutup bagian dari teluk untuk mengantisipasi jika penurunan muka tanah di Jakarta bagian timur tidak dapat dihentikan.

Belanda telah berpengalaman dalam penanggulangan banjir karena sebagian besar wilayah Belanda berupa dataran rendah. Pemerintah Belanda membangun tanggul-tanggul raksasa bagi daerah yang tidak memiliki polder (tanah yang dikelilingi tanggul) agar terhindar dari gelombang pasang surut air laut. Belanda memiliki teknologi, inovasi, dan tenaga ahli yang mumpuni. Karena pengalaman tersebut Pemerintah Indonesia memutuskan untuk bekerjasama dengan Pemerintah Belanda dalam pelaksanaan proyek NCICD.

Pengalaman Belanda dalam menanggulangi banjir menjadi model yang baik dalam pengendalian banjir di Jakarta. Bagi Belanda kerja sama ini memberi keuntungan politik dengan mendapatkan kepercayaan dari pemerintah dan masyarakat Indonesia. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis mengangkat judul “Kerja Sama Indonesia –

Belanda dalam Penanggulangan Banjir di Jakarta Melalui Proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).”

## **Kerangka Teori**

### **Kerja Sama Internasional**

Untuk menunjang penelitian ini maka penulis menggunakan teori kerja sama internasional, isu utama dalam kerja sama internasional berkisar pada keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerja sama yang dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral.

Sejak semula, fokus dari teori hubungan internasional adalah mempelajari tentang penyebab – penyebab dan kondisi – kondisi yang menciptakan kerja sama. Kerja sama dapat tercipta sebagai akibat dari penyesuaian – penyesuaian perilaku aktor – aktor dalam merespon atau mengantisipasi pilihan – pilihan yang diambil oleh aktor – aktor lainnya. Kerja sama dapat dijalankan dalam suatu proses perundingan yang diadakan secara nyata atau karena masing – masing pihak saling tahu sehingga tidak lagi diperlukan suatu perundingan.

Kerja sama dapat didefinisikan sebagai serangkaian hubungan – hubungan yang tidak didasarkan pada kekerasan atau paksaan dan disahkan secara hukum, seperti dalam organisasi internasional seperti PBB atau Uni Eropa. Aktor – aktor negara membangun hubungan kerja sama melalui suatu organisasi internasional dan rezim internasional yang didefinisikan sebagai seperangkat aturan – aturan yang disetujui, regulasi – regulasi, norma – norma dan prosedur – prosedur pengambilan keputusan, dimana harapan – harapan para aktor dan kepentingan – kepentingan negara bertenu dalam suatu lingkup hubungan internasional.

Kerja sama Internasional secara umum adalah kerja sama yang dilakukan antar negara dalam rangka pemenuhan kebutuhan negara dengan berpedoman pada politik luar negeri masing - masing negara. Tujuan dilakukannya kerja sama internasional antara lain memacu pertumbuhan ekonomi negara, mewujudkan pengertian antar bangsa dalam membina dan menegakkan perdamaian dunia, menciptakan keadilan dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat, memperluas lapangan kerja, memperkuat rasa persahabatan antar negara.

Kerja sama dilakukan dalam rangka mengurangi kerugian negative yang diakibatkan oleh tindakan – tindakan individual negara yang memberi dampak terhadap negara lainnya. Kerja sama dapat tumbuh dari suatu komitmen individu terhadap kesejahteraan bersama atau sebagai usaha pemenuhan kepentingan pribadi. Kunci dari perilaku kerja sama ada pada sejauh mana setiap pribadi percaya bahwa yang lainnya akan bekerjasama. Sehingga isu utama dari teori kerja sama adalah didasarkan pada pemenuhan kepentingan pribadi, dimana hasil yang menguntungkan kedua belah pihak dapat diperoleh dengan bekerjasama dari pada dengan usaha sendiri atau dengan persaingan.

Menurut K. J. Holsti (K.J Holsti 1995), kerja sama internasional dapat didefinisikan sebagai berikut :

- a) Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.
- b) Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai – nilainya.

c) Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau berbenturan kepentingan.

d) Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi dimasa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.

e) Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.

Ada beberapa alasan mengapa negara yang harus melakukan kerja sama dengan negara lainnya :

a) Dengan alasan demi meningkatkan kesejahteraan ekonominya banyak negara yang melakukan kerja sama dengan negara lainnya untuk mengurangi biaya yang harus ditanggung negara tersebut dalam memproduksi suatu produk kebutuhan bagi rakyatnya karena adanya keterbatasan yang dimiliki negara tersebut.

b) Untuk meningkatkan efisiensi yang berkaitan dengan pengurangan biaya.

c) Karena adanya masalah – masalah yang mengancam kemanan bersama.

d) Dalam rangka mengurangi kerugian negatif yang diakibatkan oleh tindakan – tindakan individual negara yang memberi dampak terhadap negara lain.

Suatu kerja sama internasional didorong oleh beberapa faktor :

a) Kemajuan di bidang teknologi yang menyebabkan semakin mudahnya hubungan yang dapat dilakukan negara sehingga meningkatkan ketergantungan satu dengan yang lainnya.

b) Kemajuan dan perkembangan ekonomi mempengaruhi kesejahteraan bangsa dan negara. Kesejahteraan suatu bangsa dapat mempengaruhi kesejahteraan bangsa – bangsa.

c) Perubahan sifat peperangan dimana terdapat suatu keinginan bersama untuk saling melindungi dan membela diri dalam bentuk kerjasama internasional.

d) Adanya kesadaran dan keinginan untuk bernegosiasi, salah satu metode kerja sama internasional yang dilandasi atas dasar bahwa dengan bernegosiasi akan memudahkan dalam pemecahan masalah yang dihadapi.

Kerja sama internasional terbagi atas dua bentuk, antara lain :

a) Kerjasama Pertahanan-Keamanan (Collective Security)

b) Kerjasama Fungsional (Functional Co-operation)

Kerja sama ini biasanya kerja sama di bidang ekonomi, politik, dan sosial-budaya. Selain bentuk-bentuk di atas, kerja sama internasional juga dibagi dalam bentuk kerja sama bilateral, multilateral dan regional. Kerja sama antara Indonesia dan Belanda termasuk kedalam kerja sama bilateral karena dilakukan oleh dua negara. Kerja sama NCICD Indonesia - Belanda termasuk kedalam kerja sama fungsional, yaitu kerja sama yang bertujuan untuk meningkatkan bidang ekonomi antara kedua negara tersebut.

Kerja sama bilateral dapat dilaksanakan antara Indonesia dan suatu negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia dan keduanya telah menandatangani persetujuan, MoU atau Agreement menjadi dasar atas semua bentuk kerja sama yang dilakukan.

Kerja sama yang terjalin antara Indonesia dengan Belanda merupakan salah satu bentuk dari interaksi antar aktor dalam menjalin sebuah hubungan internasional (mencakup kerja sama internasional dan hubungan bilateral). Adanya hubungan tersebut sebagai akibat dari adanya saling ketergantungan untuk memenuhi kebutuhan negaranya.

Karena setiap negara pasti membutuhkan negara lain untuk memenuhi kebutuhan di negaranya dan untuk mencapai kepentingan dari tujuan bersama. Dalam hal ini dapat dilihat dari latar belakang kerja sama Indonesia dengan Belanda yang terjalin sudah cukup lama.

Indonesia dan Belanda telah menjalin kerja sama diberbagai bidang, baik itu politik, ekonomi, sosial-budaya, keamanan, pendidikan, maupun dalam bidang air. Kerja sama internasional yang terjalin antara Indonesia dan Belanda merupakan suatu bentuk kerja sama yang dilatarbelakangi oleh kepentingan nasional dari suatu negara. Yang mana kepentingan nasional ini merupakan suatu bentuk dari sebuah negara yang membutuhkan negara lain untuk memenuhi kebutuhan negaranya sendiri.

Dalam hubungan internasional, kepentingan nasional dari suatu negara dapat menjadi pendorong dilakukannya berbagai interaksi internasional diberbagai bidang seperti dalam bidang air. Karena hal tersebut terjadilah hubungan antara Indonesia dengan Belanda yang menjalin hubungan kerja sama dalam bidang air.

Indonesia mempunyai kepentingan nasional, dimana kepentingan nasional tersebut melihat bahwa Belanda mampu mengatasi masalah banjir dinegaranya, yang mana kita tahu dataran Belanda lebih rendah daripada lautannya, dan masalah banjir rob pun sering dialami oleh Belanda dulu. Tetapi setelah membangun berbagai banyak tanggul raksasa dan juga polder-polder air kini Belanda tidak khawatir lagi dengan masalah banjir.

Sama halnya dengan Belanda, dataran ibukota Jakarta daratannya juga lebih rendah daripada lautannya sehingga sering terkena banjir rob. Kurangnya lahan terbuka hijau dan sistem sanitasi yang buruk mengakibatkan Jakarta sering dilanda banjir besar ketika musim hujan tiba.

Karena hal tersebut, Indonesia ingin agar bisa seperti negara Belanda yang mana bisa mencegah dan menanggulangi bencana banjir dengan bekerjasama dalam membangun tanggul-tanggul raksasa yang terdapat di pesisir pantai Jakarta juga menggunakan sistem polder air, agar jika terjadi banjir air langsung bisa dialihkan kelaut, dan kerja sama ini tidak hanya diterapkan di Jakarta saja melainkan di kota-kota lain di Indonesia juga diterapkan seperti proyek percontohan sistem polder air.

Sedangkan bagi Belanda, Pemerintah Belanda dapat menunjukkan bahwa Belanda telah berhasil dalam menanggulangi banjir yang dari dulu menghantui negara Belanda. Belanda bisa memperkenalkan inovasi teknologi dan metodologi yang dipakai dalam menanggulangi banjir, memberikan pertukaran informasi dan keterampilan teknis dengan memberangkatkan ahli-ahli dari Indonesia ke Belanda untuk melihat secara langsung dan mempelajarinya, memberi informasi riset dan juga pengembangan teknologi yang tepat dan murah untuk diterapkan di Indonesia, dan lain sebagainya.

### **Penanggulangan Banjir**

Penanggulangan banjir merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana banjir, kegiatan pencegahan bencana banjir, tanggap darurat dan rehabilitasi. Tujuan dari penanggulangan bencana banjir adalah :

- a. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana banjir.
- b. Menyelaraskan peraturan perundang – undangan yang sudah ada.
- c. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana banjir secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
- d. Menghargai budaya lokal.

- e. Membangun partisipasi dan kemitraan publik dengan swasta.
- f. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan.
- g. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pengendalian banjir pada dasarnya dapat dilakukan dengan berbagai cara, namun yang penting adalah dipertimbangkan secara keseluruhan dan dicari sistem yang paling optimal.

Kegiatan pengendalian banjir menurut lokasi / daerah pengendaliannya dapat dikelompokkan menjadi dua :

- a. Bagian hulu : yaitu dengan membangun dam pengendali banjir yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir, pembuatan waduk lapangan yang dapat merubah pola hidrograf banjir dan penghijauan di Daerah Aliran Sungai.
- b. Bagian hilir : yaitu dengan melakukan perbaikan alur sungai dan tanggul, sudetan pada alur yang kritis, pembuatan alur pengendali banjir atau flood way, pemanfaatan daerah genangan untuk retarding basin dan sebagainya.

Sedangkan menurut teknis penanganan pengendalian banjir dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

- a. Pengendalian banjir secara teknis (metode struktur).
- b. Pengendalian banjir secara non teknis (metode non-struktur).

Semua kegiatan tersebut dilakukan pada prinsipnya dengan tujuan :

- a. Menurunkan serta memperlambat debit banjir di hulu, sehingga tidak mengganggu daerah - daerah peruntukan di sepanjang sungai.
- b. Mengalirkan debit banjir ke laut secepat mungkin dengan kapasitas cukup di bagian hilir.
- c. Menambah atau memperbesar dimensi tampang alur sungai.
- d. Memperkecil nilai kekasaran alur sungai.
- e. Pelurusan atau pemendekan alur sungai pada sungai berbelok atau bermeander. Pelurusan ini harus sangat hati-hati dan minimal harus mempertimbangkan geomorfologi sungai.
- f. Pengendalian transpor sedimen.

Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan jenis bangunan pengendalian banjir adalah sebagai berikut:

- a. Pengaruh regim sungai terutama erosi dan sedimentasi (degradasi dan agradasi sungai) dan hubungannya dengan biaya pemeliharaan.
- b. Kebutuhan perlindungan erosi di daerah kritis.
- c. Pengaruh bangunan terhadap lingkungan.
- d. Perkembangan pembangunan daerah.
- e. Pengaruh bangunan terhadap kondisi aliran di sebelah hulu dan sebelah hilirnya.

## Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik studi literatur. Data-data tersebut berasal dari buku, jurnal, dan juga internet yang berhubungan dengan kerja sama Indonesia – Belanda dalam penanggulangan banjir di Jakarta melalui proyek *National Capital Integrated Coastal Development* (NCICD).

## Hasil dan Pembahasan

### Kerja Sama Indonesia – Belanda dalam Proyek NCICD di Jakarta (Jakarta Utara)

#### A. Proses Kerja Sama Indonesia – Belanda

Dalam kerja sama Indonesia - Belanda untuk menanggulangi banjir di Jakarta (Jakarta Utara) menghasilkan proyek yang disebut sebagai *National Capital Integrated Coastal Development* (NCICD).

##### 1. Timeline Kerja Sama :

- a. Pada tahun 2013 IWWA (Internasional Water Week Amsterdam) 29 Delegasi Indonesia terdiri dari Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD meninjau tanggul Afsluitdijk Belanda
- b. Pada April 2014 Menteri Belanda (Melanie Schultz van Haegen) Mempresentasikan Visi dan Rekomendasi NCICD di Jakarta.
- c. Pada September 2015 Penandatanganan Letter of Intent NCICD Indonesia – Belanda.
- d. Pada Oktober 2015 Pertemuan antara Tenaga ahli Belanda dengan Kementerian PUPR menyusun rancangan NCICD di Jakarta
- e. Pada November 2015 Pertemuan di Paris Prancis antara Presiden Indonesia (Joko Widodo) dengan PM Belanda (Mark Rutte) Presiden Indonesia meminta agar proyek cepat diimplementasikan.
- f. Pada Februari 2016 Penandatanganan MoU diwakili oleh Sekjen Kementerian PUPR Mr. Taufik Widjoyono dan Pemerintah Belanda Mrs Lidewijde Ongerling di Jakarta.
- g. Pada tahun 2016 Pertemuan Bilateral di Deen Hag Belanda antara Presiden Indonesia (Joko Widodo) dengan PM Belanda (Mark Rutte) Mengapresiasi Pembangunan NCICD yang sedang berlangsung.
- h. Pada Februari 2017 Pemerintah Indonesia dan Belanda membahas rancangan NCICD Fase II di Jakarta.
- i. Pada April 2018 Pertemuan di Jakarta antara Kementerian PUPR dengan Pemerintah Belanda membahas kerjasama yang sedang berlangsung di bidang Air pada umumnya dan NCICD pada khususnya.
- j. Pada November 2018 Komite Pengarah Bersama (Joint Steering Comitee) MoU on Water delegasi Indonesia dan Belanda bertemu di Deen Haag Belanda untuk membahas kemajuan proyek kerja sama pada MoU on Water.
- k. Pada tahun 2019 PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Infrastruktur dan Manajemen Air Belanda, Cora van Nieuwenhuizen-Wijbenga menandatangani MoU NCICD Tahap II di New York.
- l. Pada Februari 2020, 10 delegasi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengunjungi Rotterdam Belanda dibawah Program DUTEP (Dutch Training and Exposure Program).

##### 2. Proses Awal Kerja Sama Indonesia – Belanda

Pada proses awal kerja sama Indonesia dan Belanda mengenai NCICD, Indonesia mengirimkan 29 Delegasi yang terdiri dari Pemerintah Pusat, BUMN dan BUMD ke Belanda pada pertemuan *Internasional Water Week* Amsterdam 2013 untuk meninjau tanggul Afsluitdijk di provinsi Friesland Belanda dimana panjang tanggul tersebut yaitu 32 km, menghubungkan antara provinsi Friesland dan Belanda utara. Tanggul tersebut akan menjadi model untuk pembangunan NCICD di Jakarta Utara.

Pada tahun 2014 Menteri Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Belanda (Melanie Schultz Van Haegen) mempresentasikan rencana perlindungan banjir *National Capital Integrated Coastal Development* (NCICD) di Jakarta, bersama Menteri Pekerjaan Umum (Djoko Kirmanto). Master Plan berisi visi dan rekomendasi praktis yang ditujukan untuk menjamin keselamatan 4 hingga 5 juta penduduk Jakarta.

Pada 3 September 2015 penandatanganan Letter of Intent tentang kerja sama Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Nasional/NCICD antara pemerintah Belanda dengan pemerintah Indonesia. Kedua negara sepakat untuk bekerja sama dalam implementasi Master Plan NCICD. Para pihak akan merancang dan memulai program terkoordinasi untuk bantuan teknis implementasi NCICD.

Penandatanganan Letter of Intent untuk Belanda (Ferdinand Lahnstein), Kuasa Usaha Kedutaan Besar Belanda. Penandatanganan saksi dari Pemerintah Indonesia adalah (Luky Eko Wuryanto), Deputy Menteri Koordinasi Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Taufik Widjoyono) Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum. Penandatanganan dilakukan di hadapan Menteri Pekerjaan Umum (Basuki Hadimuljono).

### 3. Proses Implementasi Kerja Sama NCICD

Implementasi kerja sama pembangunan tanggul NCICD dilakukan setelah penandatanganan *Letter of Intent* pada tahun 2015. Selanjutnya pada Oktober 2015 dilakukan pertemuan antara tenaga ahli Belanda dengan Kementerian PUPR untuk membahas rancangan master plan NCICD yang telah berlangsung. Pemerintah Belanda memfokuskan pembangunan pada penguatan pertahanan banjir yang ada, perumusan strategi keuangan untuk NCICD dan pembentukan serta pelatihan organisasi pelaksana yang akan memimpin pengadaan dan pelaksanaan program NCICD.

Kemudian pada tahun 2015 pertemuan para pemimpin UNFCCC COP21 (*United Nation Framework Convention on Climate Change, Conference of the Parties 21*) di Paris Perancis Presiden Indonesia (Joko Widodo) melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Belanda (Mark Rutte). Pada pertemuan tersebut kedua negara memfokuskan pembicaraan pada dua hal yaitu pembangunan *National Capital Integrated Coastal Development* (NCICD) dan Deep Seaport. Presiden Indonesia (Joko Widodo) meminta agar kerja sama antara Belanda – Indonesia dalam pembangunan NCICD dapat dimaksimalkan.

Pada tahun 2016 Presiden Indonesia (Joko Widodo) melakukan kunjungan kenegaraan ke Belanda untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Belanda (Mark Rutte). Pada pertemuan bilateral ini Presiden Indonesia (Joko Widodo) mengapresiasi kerja sama dengan Belanda dalam proyek *National Capital Integrated Coastal Development* yang sedang berlangsung saat ini untuk mengatasi tantangan penanggulangan banjir, mengatasi abrasi pantai dan ketersediaan air bersih, untuk mengatasi tiga tantangan tersebut dilakukan kerja sama dalam bidang transfer keahlian dan teknologi.

Pada tahun 2019 di PBB New York, Pemerintah Indonesia Menteri (Basuki Hadimuljono) melakukan pertemuan bilateral dengan Pemerintah Belanda Menteri (Van Nieuwenhuizen) menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) baru untuk pelaksanaan (NCICD) yaitu strategi manajemen banjir Jakarta. Dasar dari Nota Kesepahaman ini adalah pembaruan strategi yang disebut dengan Rencana Keselamatan Banjir Terpadu 2019 (*Integrated Flood Safety Plan/IFSP 2019*). IFSP 2019 ini memiliki tiga tahap yaitu tahap pertama meningkatkan tanggul laut yang ada dan memperbaiki drainase kota yang telah dalam pembangunan. MoU ini berfokus pada kerja sama untuk



tahap A dan tahap kedua B (konstruksi pemecah gelombang lepas pantai besar dengan jalan tol). Menghentikan penurunan tanah, mempercepat pasokan air pipa dan komponen kunci sanitasi.

Pada November 2018 delegasi dari Indonesia dan Belanda untuk Komite Pengarah Bersama (*Joint Steering Comitee*) MoU *on Water* bertemu di Deen Haag Belanda membahas kemajuan proyek di bawah MoU *National Capital Integrated Coastal Development* saat ini. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia (Anita Firmanti), menekankan pentingnya percepatan kegiatan saat ini serta kerja sama yang terintegrasi dan strategis dengan pemerintah Belanda dan sektor air. Sekretaris Jenderal Belanda (Lidwilde Ongering) menyampaikan tentang pentingnya beralih dari proyek percontohan ke implementasi yang lebih luas, pembiayaan inovatif dan memperbarui kerangka kerja sama setelah 2020. *Joint Steering Comitee* diikuti dengan satu hari kunjungan lapangan di Belanda.

## **B. Bentuk Kerja Sama Indonesia – Belanda**

### **1. Pembangunan Tanggul NCICD**

Pembangunan tanggul NCICD ada tiga fase yaitu fase A,B dan C. Pada tahun 2017 untuk Fase A paket I yang berlokasi di Kelurahan Muara Baru (Pluit), Kecamatan Panjaringan, Jakarta Utara telah mencapai 57,97 persen dengan tanggul yang telah terbangun mencapai 1.317 meter. Dikerjakan oleh kontraktor PT Waskita Karya dan PT. Adhi Karya KSO (Kerja Sama Operasi) dengan nilai kontrak Rp. 379 miliar.

Pada paket II yang berlokasi di Kelurahan Kali Baru, Kecamatan Clincing, Jakarta Utara pada tahun 2017 telah mencapai 54,43 persen dengan pembangunan tanggul yang telah terbangun 1.372 meter. Dikerjakan oleh kontraktor PT. Wijaya Karya dan PT. SAC Nusantara KSO dengan nilai kontrak senilai Rp. 405 miliar. Sehingga total keseluruhan progres pembangunan tanggul pantai tahap II tahun 2017 mencapai 56,14 persen dengan tanggul yang telah terbangun sepanjang 2.689 meter dari target 4.500 meter. (Sekretariat Kabinet, 2017)

### **2. Membentuk Unit Khusus NCICD**

Pemerintah Belanda dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membentuk unit khusus untuk NCICD. Tujuan dari pembentukan Unit Khusus NCICD adalah untuk memudahkan koordinasi dan pelaksanaan proyek. Unit khusus tersebut telah disahkan pada bulan Februari 2017, yang terdiri dari gabungan divisi internal Kementerian PUPR (Ditjen SDA, Ditjen Cipta Karya, BPIW, dan Balitbang) yang terdiri dari tiga Project Management Unit (PMU) dan satu Sekretariat PMU. Tiga PMU tersebut terdiri dari: (PMU I) Bidang Program dan Perencanaan, (PMU II) Bidang Pembangunan Tanggul, Pengendalian Banjir, dan Air Baku, (PMU III) Bidang Pembangunan Sanitasi dan Air Minum. Sekretariat PMU berfungsi untuk memonitor kegiatan setiap Bidang PMU untuk dilaporkan ke Ketua PMU.

### **3. Pembiayaan Infrastruktur NCICD**

Pembiayaan proyek NCICD oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi DKI Jakarta masing – masing sebesar Rp. 1,6 Triliun, dan Pemerintah Belanda mellaui anggaran ODA Belanda sebesar 8 juta Euro.

## **C. Hasil Kerja Sama**

Berbagai langkah strategis dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Pemerintah Indonesia dengan berkolaborasi dengan Pemerintah Belanda dalam upaya

mengendalikan banjir di Jakarta (Jakarta Utara). Dengan membangun tanggul yang disebut dengan National Capital Integrated Coastal Development (NCICD)/PTPIN Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara. Penanganan banjir di DKI Jakarta pada tahun 2021 jauh lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya. Sebagai contoh, banjir yang terjadi pada 20 Februari 2021 disebabkan hujan ekstrem 226 mm/hari yang melebihi kapasitas tampungan drainase DKI Jakarta yang berkisar 100-150 mm/hari. Kejadian tersebut berdampak pada 49 RT dari total 30.470 RT di Jakarta (1,6 % dari total area). Namun, berbeda jauh dibandingkan dampak banjir pada tahun-tahun sebelumnya dengan curah hujan yang sama, banjir tersebut berhasil ditangani secara cepat, sehingga warga bisa langsung kembali beraktivitas sehari setelahnya. Dan pengendalian banjir rob dapat diminimalisir dengan adanya tanggul yang telah dibangun di sepanjang pesisir utara Jakarta

### **Kesimpulan**

Hubungan bilateral pemerintah Indonesia dengan Belanda sudah lama terjalin, baik dari bidang politik, ekonomi, sosial - budaya maupun pendidikan. Untuk menanggulangi banjir dan beberapa isu utama seperti penurunan muka tanah, keterbatasan air bersih, penambahan kawasan produktif melalui reklamasi dan revitalisasi kawasan pesisir di Jakarta (Jakarta Utara) Pemerintah Indonesia dan Belanda melakukan kerja sama untuk membangun proyek yang disebut dengan National Capital Integrated Coastal Development.

Kerja sama tentang pembangunan National Capital Integrated Coastal Development / Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara ini telah terjalin dari tahun 2015 sampai 2020 dan MoU diperbarui pada tahun 2019. Upaya yang dilakukan Indonesia – Belanda dalam menanggulangi banjir di Jakarta adalah Belanda memberikan bantuan berupa pertukaran informasi keterampilan teknis strategi pengoperasian dan pemeliharaan saluran air, model pembangunan tanggul laut serta pembiayaan proyek NCICD.

### **Daftar Pustaka**

- Banjir Batavia, banjir kanal dan van Breen” artikel dalam Harian Kompas (Diakses pada 20 Maret 2020)
- DKI rentan perubahan iklim” [www.beritajakarta.com](http://www.beritajakarta.com) (diakses pada tanggal 20 Maret 2022)
- Elfandari Afarizi Rezki, “Kerjasama Indonesia – Belanda dibidang Tata Kelola Air dan Lingkungan Hidup”. Universitas Komputer Indonesia
- Holsti, K.J. (1995). *International Politics A Framework For Analysis*. (Edisi Ketujuh). Pratince-Hall.
- Koesnadi Kartasmita, Koesnandi. (1977). *Administrasi Internasional*, Lembaga Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bandung.
- Kerjasama Air Belanda (NWP) 2016, *Majalah*, [https://magazine\\_webversion2](https://magazine_webversion2) (Diakses pada 10 November 2022)
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2014). *Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara 93 Hlm*. Jakarta
- [Kppip.go.id](http://kppip.go.id),” *Proyek Prioritas Air dan Sanitasi*” <https://kppip.go.id/proyek-prioritas/air-dan-sanitasi/tanggul-laut/>. (Diakses Pada 17 November 2020)
- [Kppip.go.id](http://kppip.go.id),”*Proyek Strategis Nasional*” . (Diakses Pada 17 November 2020)

- Maarten Bakker (SOMO), Satoko Kishimoto (TNI), Christa Nooy (Both ENDS) (2017). Keadilan sosial di pesisir, peran Belanda dalam proyek pertahanan pesisir dan reklamasi.
- Pemprov DKI Jakarta. ( 2010 ). Mengapa Jakarta Banjir. PT Mirah Sakethi Jakarta
- Puslitbang Sumber Daya Air. (2014). Pengkajian Pola Sedimentasi Akibat Tanggul Laut Lepas Pantai. Kementrian PUPR.
- Peraturan Pemerintah No. 37 ( 2010 ) LN 2010 No. 45 TLN No. 5117, LL SETNEG 69 Halaman
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi. (2017). Modul Penanggulangan Bencana Banjir Pelatihan Pengendalian Banjir. Kementerian PUPR.
- Perkembangan Kota Kriminalitas, dan Pemberdayaan Warga Jakarta “Harian Kompas (Diakses Pada 20 Maret 2020)
- Septyana Arisandi, Annisa. (2017) ”Kerjasama Sister City Jakarta - Rotterdam dalam Penanggulangan Banjir Jakarta” ejournal Ilmu Hubungan Internasional. Universitas Mulawarman.
- Smartcity.Jakarta.go.id “ Upaya Jakarta Menghalau Banjir” (Diakses pada 19 Mei 2021)
- Sda.pu.go.id ” Menikmati Tanggul Pantai di Muara Baru dan Kali Baru (Diakses pada 24 Januari 2021)
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia “Setkab.go.id” Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai Jakarta Tahap 2 Sudah 54 Persen (Diakses 10 November 2022)
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Setkab.go.id,” Pembangunan Tanggul Pantai Jakarta Tahap II Ditargetkan Rampung Pertengahan 2018” (Diakses 10 November 2022)